# ANALISIS PENGARUH AGRESIVITAS PAJAK TERHADAP

# PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: UNTUK

# **MENGUJI TEORI LEGISTIMASI**

(Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013)



# **SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

RIZKY BAYU AJI BASKORO NIM. 12030111130182

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2015

# PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Rizky Bayu Aji Baskoro

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130182

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH AGRESIVITAS

PAJAK TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: UNTUK MENGUJI TEORI LEGISTIMASI (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di

Bursa Efek Indonesia Tahun 2013)

Dosen Pembimbing : Faisal, S.E., M.Si., Akt., Ph.D.

Semarang, 12 Agustus 2015

Dosen Pembimbing,

(Faisal, S.E., M.Si., Akt., Ph.D..)

NIP 19710902001121001

# PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

: Rizky Bayu Aji Baskoro

Nama Penyusun

Nomor Induk Mahasiswa	: 12030111130182			
Fakultas/Jurusan	: Ekonomika dan Bisnis/Aku	ntansi		
Judul Skripsi	: ANALISIS PENGARUH A PAJAK TERHADAP PENG CORPORATE SOCIAL RES UNTUK MENGUJI TEOR (Studi Empiris Pada Perusaha Bursa Efek Indonesia Tahun 2	GUNGKAPAN SPONSIBILITY: I LEGISTIMASI aan yang Terdaftar di		
Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 7 September 2015				
Tim Penguji				
1. Faisal, S.E.,M.Si.,Akt.,Ph	n.D	()		
2. Dr. Agus Purwanto, S.E.,	M.Si.,Akt.	()		
3. Dr. P. Basuki Hadiprajitn	o.,MBA.,M.Acc	()		

### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Rizky Bayu Aji Baskoro, dengan judul: **ANALISIS PENGARUH** menyatakan bahwa skripsi AGRESIVITAS PAJAK TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: UNTUK MENGUJI TEORI LEGITIMASI (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolaholah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 12 Agustus 2015 Yang membuat pernyataan,

(Rizky Bayu Aji Baskoro) NIM. 120301111301082

### MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Jadilah kamu manusia yang pada saat kelahiranmu semua orang tertawa gembira, hanya kamu sendiri yang menangis. Dan pada saat kematianmu semua orang menangis bersedih, hanya kamu sendiri yang tersenyum bahagia."

(Mahatma Gandhi)

"Buktikan bahwa diri kita berharga dan akan dikenang oleh orang lain"

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Ibu, Bapak dan Kakak-kakakku tercinta

Keluarga yang ku sayangi

Sahabat-sahabat terbaikku

Terima kasih atas segala doa, dukungan,

dan bantuannya

#### **ABSTRACT**

This study aims to examine the influence of corporate tax aggressiveness with corporate social responsibility (CSR): to test legitimacy theory. Independent variables used in this study is the tax aggressiveness that is measured using three proxies, that are effective tax rates (ETR1 and ETR2) and the book tax differences (BTD), while the dependent variable in this study is corporate social responsibility (CSR). This study uses four control variables; include return on assets (ROA), leverage, size, and capital intensity.

This study developed a research conducted by Lanis and Richardson (2013). Samples of this research are companies listed on Indonesia Stock Exchange in 2013. The samples were selected by using purposive sampling method. Total number of listed companies is 516 sample companies. After going through the data processing stage, there are 83 samples that should be excluded from the samples because they do not have or do not publish CSR reports, and then 119 samples should also be removed because those companies has negative profit, so the total final sample used was 314 companies. The analysis test is conducted using a regression analysis model called ordinary least square.

The result shows that the corporate tax aggressiveness gives positive effect on the disclosure of CSR, but it had not significant effect when it was measured by using ETR1 and BTD. However, the result had a significant effect when it was measured by using ETR2. According to the results obtained by a calculation by using proxy ETR2, companies that commit aggressiveness acts will reveal greater CSR compared to companies that do not do it. This justifies the legitimacy theory in the context of tax aggressiveness.

**Keywords**: corporate social responsibility, tax aggressiveness, legitimacy theory.

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh agresivitas pajak perusahaan dengan corporate social resposibity (CSR): untuk menguji teori legitimasi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak yang diukur menggunakan tiga proksi, yaitu effective tax rates (ETR1 dan ETR2) serta book tax differences (BTD) sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah corporate social responsibility (CSR). Penelitian ini menggunakan empat variabel kontrol yaitu return on asset (ROA), leverage, size, capital intensity.

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2013). Sampel penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013. Sampel penelitian dipilih dengan metode *purposive sampling*, dan jumlah keseluruhan perusahaan yang terdaftar adalah 516 sampel perusahaan. Setelah melalui tahap pengolahan data terdapat 83 sampel yang harus dikeluarkan dari sampel penelitian karena tidak memiliki atau tidak menerbitkan laporan CSR, dan kemudian harus dikeluarkan lagi sebanyak 119 sampel karena perusahaan memiliki laba negatif, sehingga total sampel akhir yang digunakan adalah 314 perusahaan. Uji analisis menggunakan model analisis regresi *ordinary least square*.

Hasil penelitian menunjukan bahwa agresivitas pajak perusahaan berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan CSR, namun tidak berpengaruh signifikan apabila diukur dengan proksi ETR1 dan BTD, namun menghasilkan pengaruh yang signifikan apabila diukur menggunakan proksi ETR2. Menurut hasil yang diperoleh dengan perhitungan menggunakan proksi ETR2, perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas akan mengungkapkan CSR lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan agresivitas pajak. Hal ini membenarkan teori legitimasi dalam konteks agresivitas pajak.

Kata kunci : corporate social responsibility, agresivitas pajak, teori legitimasi.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "ANALISIS PENGARUH AGRESIVITAS PAJAK TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: UNTUK MENGUJI TEORI LEGITIMASI (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013)". Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, saran dan doa serta fasilitas dari berbagai pihak.Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

- Dr. Suharnomo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis
   Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan
   bagi penulis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan pada Fakultas

   Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- 2. Prof. Dr. H. Muhammad Syafruddin, M.Si., Akt, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, serta selaku dosen wali yang telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi selama masa perkuliahan.

- 3. Faisal, S.E.,M.Si.,Akt.,Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan nasihat, dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
- 4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan. Serta segenap staf, karyawan dan seluruh anggota keluarga besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
- 5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Agoes Irianto dan Ibu Diyanti serta kakak-kakakku tersayang Anggi Priyo Utomo, Dewiyanti Lilliana, Adityo Nugroho, Novia Wulandari, Lusi Tania Oktaviani, dan Tatang Ruhiyat yang senantiasa mendoakan penulis, memberikan nasehat, dukungan, semangat, limpahan kasih sayang bagi keberhasilan penulis. Terimakasih atas segala pengorbanan baik moril maupun materiil yang telah diberikan selama ini.
- 6. *Kosmate:* Pandu, A'in dan Ragah yang menjadi teman berbagi segala keluh kesah, canda tawa, selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada penulis. Terima kasih atas kebersamaan yang kita lalui selama 3 tahun terakhir ini.
- 7. Gloria Firmanti yang telah menemani dalam susah senang, suka duka, dan berjuang bersama-sama selama masih di SMA, berjuang menghadapi ujian sekolah dan UN, serta SNMPTN hingga akhirnya bisa tetap bersama kuliah di UNDIP.

- 8. Sahabat-sahabat yang sudah seperti saudara sendiri, Akbar, Julio, Rici, Bung, Unab, Aris, Kukuh, Ame, Usro, Widya, Faris, Silo, Astri, Cempe, Nono, Arsil, Hana, Uswah, Winda, Nadia, Pandhu, Imam, Trian, Vidam, Asti, Dio, dan Agung. Terima kasih untuk kisah-kisah serunya, dan canda tawa yang tidak pernah ada canggungnya bahkan sampai sekarang meskipun sudah saling terpisahkan jarak.
- 9. Sahabat-sahabat tercinta yang sudah 4 tahun menemani masa-masa kuliah, Fajar, Hanif, Adit, Wempy, Dewi, dan keluarga Bukan Sapari Boys. Terima kasih sudah saling berbagi cerita suka dan duka, saling cangkeman, dan tentunya saling membantu selama kuliah. Juga untuk anak kontrakan yang sekarang namanya jadi anak kos NTT, sudah berbagi kesenangan bermain game bersama-sama, sudah menampung penulis saat kesepian di kos.
- 10. Sahabat-sahabat akuntansi UNDIP 2011, khususnya GIA (Gembel in Action), terima kasih untuk acara jalan-jalannya, maaf kalau penulis jarang ikut. Hanya sekedar kumpul bersama kalian juga sudah menjadi hal terindah selama 4 tahun ini, dengan acara-acara baik resmi maupun non-resmi yang selalu kita adakan membuat kita selalu kompak, seru, dan menghasilkan banyak cerita yang bisa dibanggakan untuk diceritakan pada orang-orang lain. See you on top guys!!
- Teman-teman seperjuangan bimbingan skripsi Pak Faisal: Alif, Bahrul,
   Hanif, Hasna, Melani, Novrizal, Aris, Ondi, Winda, Vena, dan Curem.

Terima kasih atas bantuan, dukungan, dan sharing selama bimbingan

skripsi.

12. Tim I KKN Desa Kedungsari Mulyo, Welahan, Jepara, yaitu: Ozi, Faiz,

Niza, Nadia, Galuh dan Fia. Terima kasih telah menjadi 'keluarga baru'

teman berbagi suka duka, canda tawa selama 1 bulan KKN dan

kekompakan yang masih terus terjalin sampai sekarang.

13. Bapak dan Ibu kos Margono, serta Tia dan Bima anak bapak ibu kos, yang

selalu baik pada kami anak-anak kos.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas doa,

dukungan, semangat dan bantuannya baik secara moril maupun materiil

dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak

kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan

saran bersifat membangun demi karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat

bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 12 Agustus 2015

Penulis

χi

# **DAFTAR ISI**

Halama	ar
HALAMAN JUDULi	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSIii	
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSANiii	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSIiv	
MOTO DAN PERSEMBAHANv	
ABSTRACTvi	
ABSTRAK vii	
KATA PENGANTAR viii	
DAFTAR ISIxii	
DAFTAR TABEL xvi	
DAFTAR GAMBARxvii	į
DAFTAR LAMPIRAN xvii	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang1	
1.2 Rumusan Masalah	
1.3 Tujuan Penelitian9	
1.4 Manfaat Penelitian9	
1.5 Sistematika Penulisan	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	

2.1.1 Teori Legitimasi	12
2.1.2 Corporate Social Responsibility (CSR)	14
2.1.3 CSR Disclosure	15
2.1.4 Agresivitas Pajak	17
2.1.5 Variabel Kontrol	18
2.1.5.1 Return on Asset (ROA)	18
2.1.5.2 Leverage (LEV)	19
2.1.5.3 Capital Intensity (CINT)	19
2.1.5.4 Ukuran Perusahaan (SIZE)	20
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Pemikiran	26
2.4 Hipotesis	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Variabel Penelitian	32
3.1.1 Variabel Independen	32
3.1.2 Variabel Dependen	33
3.1.3 Variabel Kontrol	35
3.1.3.1 Return on asset	35
3.1.3.2 Leverage	35
3.1.3.3 Capital Intensity	36
3.1.3.4 Ukuran Perusahaan	36
3.2 Populasi dan Sampel	36
3 3 Jenis dan Sumber Data	37

3.4 Metode Pengumpulan Data	38
3.5 Metode Analisis Data	38
3.5.1 Statistik Deskriptif	38
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	38
3.5.2.1 Uji Normalitas	39
3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas	39
3.5.3 Uji Hipotesis	40
3.5.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R2)	41
3.5.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	41
3.5.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	42
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	43
4.2 Analisis Data	44
4.2.1 Statistik Deskriptif	44
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	47
4.2.2.1 Uji Normalitas	47
4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas	54
4.2.3 Uji Hipotesis	59
4.2.3.1 Uji Hipotesis pada Proksi ETR1	59
4.2.3.1.1 Uji Koefisien Determinasi (R2)	59
4.2.3.1.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	60
4.2.3.1.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	61
4.2.3.2 Uji Hipotesis pada Proksi ETR2	63

4.2.3.2.1 Uji Koefisien Determinasi (R2)	53
4.2.3.2.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)6	54
4.2.3.2.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	55
4.2.3.3 Uji Hipotesis pada Proksi BTD6	57
4.2.3.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R2)6	57
4.2.3.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)6	58
4.2.3.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	59
4.3 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis	<b>'</b> 1
4.3.1 Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap CSR (ETR1)	<b>'</b> 2
4.3.2 Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap CSR (ETR2)	<b>'</b> 4
4.3.3 Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap CSR (BTD)	15
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
5.1 Kesimpulan	<b>'</b> 8
5.2 Keterbatasan	19
5.3 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	31
I AMDIDANI S	5

# **DAFTAR TABEL**

Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu
Tabel 4.1 Ringkasan Pengambilan Sampel Penelitian
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif
Tabel 4.3 Hasil Uji One-Sample Kolmogorov Smirnov (ETR1)
Tabel 4.4 Hasil Uji One-Sample Kolmogorov Smirnov (ETR2)
Tabel 4.5 Hasil Uji One-Sample Kolmogorov Smirnov (BTD)
Tabel 4.6 Hasil Uji Glejser (ETR1)
Tabel 4.7 Hasil Uji Glejser (ETR2)
Tabel 4.8 Hasil Uji Glejser (BTD)
Tabel 4.9 Hasil Uji Determinasi (ETR1)
Tabel 4.10 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) (ETR1)
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik t (ETR1)
Tabel 4.12 Hasil Uji Determinasi (ETR2)
Tabel 4.13 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) (ETR2)
Tabel 4.14 Hasil Uji Statistik t (ETR2)
Tabel 4.15 Hasil Uji Determinasi (BTD)
Tabel 4.16 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) (BTD)
Tabel 4.17 Hasil Uji Statistik t (BTD)
Tabel 4.18 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

# **DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	27
Gambar 4.1 Grafik Histogram Regresi (ETR1)	48
Gambar 4.2 Grafik Uji Normal Plot (ETR1)	48
Gambar 4.3 Grafik Histogram Regresi (ETR2)	50
Gambar 4.4 Grafik Uji Normal Plot (ETR2)	50
Gambar 4.5 Grafik Histogram Regresi (BTD)	52
Gambar 4.6 Grafik Uji Normal Plot (BTD)	52
Gambar 4.7 Grafik Scatterplot (ETR1)	54
Gambar 4.8 Grafik Scatterplot (ETR2)	55
Gambar 4.9 Grafik Scatterplot (BTD)	56

# **DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
LAMPIRAN A Daftar Sampel Perusahaan	87
LAMPIRAN B Daftar Indeks GRI	94
LAMPIRAN C Data Statistik	102
Uji Statistik Deskriptif	102
Uji Statistik Proksi ETR1	103
Uji Statistik Proksi ETR2	106
Uji Statistik Proksi BTD	109

### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

# 1.1. Latar Belakang

Pajak memiliki peranan vital dalam perekonomian Negara kita, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang dipungut dari masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.

Dari sisi perusahaan pajak merupakan sesuatu yang sebisa mungkin diminimalisir atau bahkan dihindari. Menurut Asrasani (2013), untuk meminimalisir pajak tertanggung perusahaan melakukan tax planning yang dapat menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan baik dengan cara legal maupun cara ilegal. Cara ilegal untuk meminimalisir tanggungan pajak adalah dengan cara penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak. Sedangkan cara legal untuk meminimalisir tanggungan pajak adalah dengan cara memanfaatkan celah (loopholes) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak, dan yang paling sering dilakukan oleh perusahaan adalah tindakan agresivitas ajak.

Tindakan manajerial yang dirancang untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak menjadi fitur yang semakin umum di lingkungan perusahaan di seluruh dunia (Lanis dan Richardson,2013). Tindakan agresivitas pajak tersebut menyeimbangkan antara biaya dan manfaat yang diperoleh. Menurut Slemrod (2004) dalam Balakrishnan, Blouin dan Guay (2011) bahwa agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik yang mencakup transaksi-transaksi, dimana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Khuruna dan Moser (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai tax planning perusahaan melalui aktivitas tax avoidance atau tax sheltering, yaitu tindakan agresivitas yang dirancang oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak agar memperoleh keuntungan.

Menurut Lanis dan Richardson (2012) pajak merupakan faktor pendorong dalam banyak pengambilan keputusan perusahaan. Namun, dengan agresivitas pajak perusahaan dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan. Semakin besar pajak yang harus ditanggung perusahaan maka akan mengakibatkan laba perusahaan menurun. Kebijakan-kebijakan perusahaan diperlukan untuk meminimalkan pajak agar perusahaan tetap mendapat laba maksimal. Mencari laba merupakan salah satu tujuan perusahaan agar perusahaan dapat terus beroperasi. Aktivitas perusahaan tidak terlepas dari kontak sosial dengan masyarakat, oleh karena itu pandangan masyarakat terhadap perusahaan yang melakukan agresivitas pajak adalah negatif. Kasus tersebut akan sangat menjadi perhatian publik, dan perusahaan yang terlibat dianggap telah melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial.

Menurut Darmadi (2013), tindakan nyata dalam melakukan agresivitas pajak ataupun penghindaran pajak misalnya dengan cara penghindaran pajak secara yuridis yaitu dengan melakukan perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga tindakan yang dilakukan tidak terkena pajak. Perusahaan biasanya melakukan dengan cara memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undangundang yang ada, contohnya pegawai diberi tunjangan beras (natura/kenikmatan). Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER - 31/PJ/2012 bab IV pasal 8 ayat 1 b menyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). Oleh karena itu, pemberian tunjangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya maupun penghindaran yang dilakukan dengan cara perusahaan bekerjasama dengan yayasan untuk penyaluran tunjangan tersebut. Perusahaan memberi uang kepada yayasan lalu yayasan menyalurkannya kepada pegawai dalam bentuk beras. Jadi, pegawai tetap mendapatkan beras dan hal itu dibebankan sebagai biaya sehingga pajaknya berkurang.

Menurut Darussalam (2009) apabila dilihat dari sisi wajib pajak, selama wajib pajak pribadi ataupun badan memiliki cara dalam meminimalkan pajak dan belum ada peraturan yang pasti tentang pelanggaran pajak, maka hal yang dilakukan sah-sah saja atau legal. Sedangkan dari pihak pemerintah yaitu peraturan yang ada dalam hal pembayaran perpajakan diharapkan tidak disalahgunakan dengan cara penghindaran perpajakan atau dengan meminimalkan

pajak perusahaan demi memperoleh keuntungan. Meningkatnya tindakan agresivitas pajak di berbagai belahan dunia tidak menutup kemungkinan terjadi kasus-kasus yang merugikan pemerintah, khususnya di bidang perpajakan. Ambil saja contohnya di Indonesia, terdapat kasus pada Real Estate Indonesia (REI) yang dituduh oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terkait dokumen transaksi pembayaran pajak yang diduga banyak melakukan penghindaran pembayaran Pajak Penghasilan (Setyo,2013) dalam artikel Kusuma (2013). Kasus lainnya adalah pada perusahaan pertambangan seperti PT Bumi Resources Tbk, PT Kaltim Prima Coal (KPC), dan PT Arutmin Indonesia yang diduga oleh Ditjen Pajak melakukan manipulasi pajak pada tahun 2007 sebesar Rp2,1 triliun (Tjiptartdjo, 2010).

Berdasarkan beberapa kasus di atas, tindakan agresivitas pajak merugikan pemerintah, seharusnya warga negara taat membayar pajak dalam rangka menjalankan kewajiban negara, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Namun tanpa disadari dalam melakukan pembayaran pajak yang jumlah pembayarannya dapat ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri memungkinkan wajib pajak mencari alternatif dengan meminimalisasi pembayaran pajak. Menurut Lanis dan Richardson (2013) pandangan masyarakat mengenai perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas dianggap telah membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak sah. Tindakan tersebut secara tidak langsung menjadi perhatian

publik yang mana bisa mengubah presepsi masyarakat terhadap perusahaan menjadi negatif. Selain itu perusahaan masih dibebani mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang akan memberi dampak negatif dimata masyarakat apabila perusahaan tidak melakukan tanggung jawabnya tersebut seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

Corporate Social Responsibilty (CSR) secara umum dapat dijelaskan sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar termasuk para pemangku kepentingan (stakeholder). CSR dapat didefinisikan dalam beberapa cara, termasuk "bagaimana perusahaan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dalam cara mereka beroperasi, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian" (Pemerintah UK, dalam Lanis dan Richardson, 2004). Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Akan tetapi, tingkat keterlibatan perusahaan dalam CSR sifatnya tidak wajib. Dalam konteks yang lebih luas dan bisa dibilang lebih penting, CSR berpotensi mempengaruhi agresivitas pajak dalam hal bagaimana rekening perusahaan dan mengarahkan sistem dan proses sehubungan dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Beberapa penelitian sebelumnya (misalnya Trotman, 1979; Trotman dan Bradley, 1981; Guthrie dan Parker, 1989; Deegan dan Gordon, 1996; Wilmshurst dan Frost, 2000;. Deegan et al, 2002) dalam Lanis dan Richardson (2013) menyatakan bahwa kebijakan perusahaan dalam meningkatkan perhatian publik

bertujuan agar memperoleh legitimasi dari masyarakat. Gray et al. (1995) menyatakan perusahaan biasanya berusaha untuk memperoleh legitimasi dan mempertahankan hubungan dalam lingkungan sosial dan politik yang lebih luas dimana mereka beroperasi, sedangkan tanpa adanya legitimasi perusahaan tidak akan bertahan dalam melanjutkan operasi. Pada kenyataannya, yang terjadi sekarang banyak perusahaan yang tidak melakukan CSR walaupun telah diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 yang menyatakan bahwa CSR merupakan suatu kewajiban yang perlu dilakukan oleh perusahaan namun apabila dari sudut pandang PSAK, CSR masih merupakan bentuk sukarela yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, pengungkapan CSR di Indonesia masih tergolong belum efektif apabila dibandingkan dengan negara lain. Selain itu perusahaan masih beranggapan bahwa dalam hal pengungkapan, CSR merupakan beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Padahal CSR merupakan suatu bentuk timbal balik perusahaan kepada masyarakat dalam hal tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, sedangkan ekspektasi yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat tidak sesuai dengan CSR yang diungkapkan oleh perusahaan. Hal ini sama seperti yang dinyatakan oleh Lanis dan Richardson (2013) yang menjelaskan hubungan antara pengungkapan CSR dan perhatian masyarakat timbul dari perilaku perusahaan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, seperti yang diasumsikan dalam teori legitimasi.

Agar CSR dapat efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat maka diperlukan adanya kerjasama dengan pemerintah mengenai pajak yang dibebankan kepada perusahaan. Pemerintah seharusnya mengkaji ulang mengenai

pemotongan pajak bagi perusahan yang melakukan CSR. Setiadji (2010) mengatakan bahwa selama ini perusahaan beranggapan memiliki dua beban yang sama yaitu beban pajak dan beban CSR. Pada dasarnya kedua beban tersebut digunakan untuk mensejaterahkan masyarakat. Namun agar perusahaan tidak memiliki dua beban maka perusahaan mulai mencari cara untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak. Tindakan tersebut tentu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu untuk menutupi tindakan tersebut perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya lebih besar kepada masyarakat untuk mengubah presepsi dan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Menurut Lanis dan Richardson (2013) perusahaan yang telah terbukti melakukan agresivitas pajak dapat betindak sesuai dengan teori legitimasi dengan cara melakukan pengungkapan informasi CSR tambahan.

Penelitian sebelumnya mengenai CSR dengan agresivitas pajak dilakukan oleh Watson (2012). Hasil penelitian menemukan bahwa terjadi hubungan negatif antara CSR dan agresivitas pajak yang menggunakan proksi tarif pajak yang berlaku (ETR). Penelitian ini sama halnya seperti yang dilakukan oleh dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) yang meneliti pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak. Penelitian tersebut menggunakan proksi ETR (*Effective Tax Rates*) untuk mengukur agresivitas pajak yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Lanis dan Richardson (2013) melakukan penelitian kembali dengan konteks penelitian terbalik dengan hubungan yang diteliti oleh Lanis dan Richardson (2012). Penelitian tersebut menghubungkan agresivitas pajak dengan

pengungkapan CSR dalam konteks teori legistimasi. Penelitian tersebut membedakan sampel yang diteliti dengan membedakan perusahaan yang agresivitas pajak dan non-agresivitas pajak. Hasil penelitian yang dilakukan secara konsisten menunjukan hubungan positif dan signifikan antara agresivitas pajak perusahaan dan pengungkapan CSR sehingga membenarkan teori legistimasi dalam konteks agresivitas pajak perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, saya tertarik untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Lanis dan Richardson pada tahun 2013 dalam konteks pajak di Indonesia. Penelitian ini membedakan sampel dan proksi yang digunakan, karena di Indonesia belum ada pengelompokan perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dan non agresivitas pajak, melainkan Direktorat Jendral Pajak hanya mengindikasi bahwa terdapat beberapa sektor perusahaan yang dicurigai terlibat agresivitas pajak. Oleh karena itu, penelitian ini ingin lebih membuktikan perusahaaan yang melakukan agresivitas pajak apakah akan melakukan pengungkapan CSR lebih besar.

# 1.2. Rumusan Masalah

Kasus perpajakan di Indonesia sudah sangat berkembang dan menjadi fenomena di masyarakat. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan Negara. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Sehingga beberapa perusahaan berpikiran untuk meminimalisir beban pajak, dengan tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Permasalahan yang terjadi pada perusahaan yang melakukan agresivitas pajak akan mengungkapkan informasi tambahan terkait dengan kegiatan CSR di berbagai

bidang dalam upaya untuk meringankan kekhwatiran publik. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada masyarakat akan tanggung jawab sosialnya tersebut dan hal itu sejalan dengan teori legistimasi. Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak berusaha meminimalkan pajak perusahaannya tersebut. Dalam hal ini bagi wajib pajak badan yaitu perusahaan secara tidak langsung melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak memenuhi kewajibannya. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk manjawab:

Apakah Agresivitas Pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibility)?

# 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Agresivitas Pajak terhadap *Corporate Social Responsibility*: untuk menguji teori legitimasi.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini maka diharapakan adanya manfaat sebagai berikut:

- Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan kepada perusahaan tindakan meminimalisir pajak dapat memberikan pengaruh terhadap pengungkapan CSR.
- 2. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan investor penilaian tersendiri untuk menilai perusahaan yang memiliki *image* sosial dan taat pajak.

- 3. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi mengenai agresivitas pajak perusahaan dan pengungkapan CSR.
- Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengidentifikasi resiko agresivitas pajak.

# 1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini terdapat gambaran sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

#### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian, definisi operasional penelitian, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan.

### **BAB IV: HASIL DAN ANALISIS**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum hasil dan analisis penelitian, analisis hasil penelitian beserta pembahasannya.

# BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penelitian selanjutnya.

### **BAB II**

### TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Landasan Teori

# 2.1.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat (Gray *et al*, 1996). Hal ini mengindikasian bahwa teori tersebut menjelaskan adanya kontrak sosial perusahaan terhadap masyarakat dan adanya pengungkapan sosial lingkungan. (Wilmshurts dan Frost 2000; Patten 1992; Guthrie dan Parker 1989; Tinker dan Neimark 1987; Hogner 1982) dalam Chariri (2008). Perusahaan dalam menjalankan kontrak sosial lingkungan perusahaan juga harus memperhatikan norma-norma yang ada di lingkungan masyrakat agar selaras dengan nilai-nilai sosial yang ada. Menurut Suaryana (2011) bahwa norma perusahaan selalu berubah mengikuti perkembangan sehingga terjadi perubahan dari waktu ke waktu.

Perusahaan menyadari bahwa adanya kontrak sosial dengan masyarakat sangat dibutuhkan dalam kelangsungan hidup perusahaan dan dengan adanya CSR merupakan salah satu wujud bentuk tanggung jawab perusahaan untuk masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai *justice*, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Tilt, CA. 1994 dalam

Titisari, Suwardi, dan Setiawan, 2010). Selain itu Teori legitimasi menjelaskan perusahaan melakukan kegiataan usaha dengan batasan batasan yang ditentukan oleh norma-norma, nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan Dowling dan Preffer (1975) dalam (Chariri, 2008). Dowling dan Preffer (1975) menyatakan bahwa terdapat dua dimensi agar perusahaan memperoleh dukungan legistimasi, yaitu: (1) aktivitas organisasi perusahaan harus sesuai (congruence) dengan sistem nilai di masyarakat; (2) pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan nilai sosial. Lindblom (1994) menyarankan bahwa suatu perusahaan dapat mengungkapkan CSR untuk memperlihatkan perhatian manajemen terhadap nilai-nilai masyarakat dari pengaruh negatif aktivitas perusahaan.

Perusahaan dalam hal ini dianjurkan untuk menarik perhatian masyarakat dan menyakinkan akan kegiatan operasi perusahaannya agar dapat diterima dengan baik hal ini sejalan dengan teori legistimasi. Tindakan tersebut bertujuan agar memperoleh status dimana perusahaan tersebut beroperasi dan juga mendapatkan kesan positif . Beberapa studi akuntasi juga tertarik untuk menguji secara empiris hubungan antara pengungkapan CSR dan perhatian masyarakat yang timbul dari perilaku perusahaan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat seperti yang diasumsikan oleh teori legistimasi. Naser, Al-Hussaini, Al-Kwari, dan Nuseibeh (2006) menyatakan bahwa teori legitimasi telah digunakan dalam kajian akuntansi untuk mengembangkan teori pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun menurut Deegan et al (2002)

bahwa secara keseluruhan berbagai tes teori legistimasi dalam literatur akuntansi telah menghasilkan hasil yang tidak konsisten.

## 2.1.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tanggung jawab sosial dan lingkungan didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Sedangkan menurut (The World Business Council for Sustainable Development) Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan dididefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontirbusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.

Implementasi CSR merupakan suatu wujud komitmen yang dibentuk oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan (Susiloadi, 2008). Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa CSR merupakan faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan menurut Milton Friedman dalam Solihin (2009) tanggung jawab sosial perusahaan adalah menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan (*owners*), biasanya dalam bentuk menghasilkan uang sebanyak

mungin dengan senantiasa menghindarkan aturan dasar yang digariskan dalam suatu masyarakat sebagaimana diatur oleh hukum dan perundang-undangan. Namun, menurut Suharto (2008) dalam Sayidatina (2011) CSR adalah operasi bsinis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finasial, melainkan untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik,melembaga dan berkelajutan. Menurut Harsanti (2011) CSR merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi menganut pada prinsip single bottom line yaitu nilai perusahaan hanya berfokus pada kondisi keuangannya saja dan kewajiban ekonomi pada pemegang saham (shareholder) melainkan kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan. Oleh karena itu, CSR menganut prinsip triple bottom line (John Elkington 1997) yang meliputi aspek ekonomi, lingkungan dan sosial yang terkenal dengan istilah "3P" yaitu people, planet dan profit.

## **2.1.3.** CSR *Disclosure* (Pengungkapan CSR)

Pengungkapan CSR atau *CSR disclosure* telah menarik banyak penelitian akuntansi selama dua dekade (Guthrie and Parker, 1989; Patten, 1992; Deegan and Gordon, 1996;Deegan and Rankin, 1996; Hackston and Milne, 1996; Brown and Deegan, 1998;Wilmshurst and Frost, 2000; Deegan *et al.*, 2002 dalam Lanis and Richardson (2013). Gray et al (1987, hal 4) mendefinisikan pengungkapan CSR sebagai "proses pemberian informasi yang dirancang untuk melepaskan sosial akuntabilitas". Pengungkapan CSR dalam laporan tahunan oleh suatu perusahaan sebenarnya tidak diwajibkan tetapi sebagai wujud tanggung jawab

sosial perusahaan kepada masayarakat maka sutu perusahaan mayoritas melakukan pengungkapan CSR dalam laporan tahunannya.

Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR-disclosure) yang sering juga disebut sebagai social disclosure, corporate social reporting, social accounting oleh Mathews (1995) dalam Sembiring (2005) atau corporate social responsibility oleh Hackston dan Milne (1996) dalam Sembiring (2005), merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Selain itu menurut Deegan (2002) dalam Lanis dan Richardson (2013) menyatakan bahwa pengungkapan CSR dipandang sebagai sarana yang digunakan oleh menajemen perusahaan dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas untuk mempengaruhi persepi.

Ketentuan mengenai pengungkapan CSR di Indonesia sampai saat ini belum terdapat standar khusus, tetapi menurut sembiring (2005) pengungkapan CSR dilakukan dengan metode *checklist* berdasarkan tujuh kriteria. Kriteria ini diadopsi dari peneltian Hackson dan Milne (1996), dimana terdapat 90 item pengungkapan namun menurut peraturan BAPEPAM No VIII.G.2 hanya 78 *item* pengungkapan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Pengungkapan CSR dengan cara tersebut sama halnya dengan pengungkapan CSR dengan konsep dari GRI (*Global Reporting Initiative*) sebagai acuan dalam penyusunan pelaporan CSR. Konsep ini merupakan konsep *sustainability report* yang muncul sebagai akibat adanya konsep *sustainability development*.

# 2.1.4. Agresivitas pajak

Agresivitas pajak didefinisikan sebagai penurunan penghasilan kena pajak melalui kegiatan perencanaan pajak. Dengan demikian kegiatan tersebut meliputi perencanaan pajak yang legal atau yang mungkin berada di dalam wilayah abuabu, serta kegiatan yang ilegal (Frank, et.al. 2009; Chen, et.al. 2010 dalam Lanis dan Richardson). Mengambil sudut pandang bahwa perusahaan adalah "dunia nyata" entitas dengan kewajiban sosial dan bahwa pembayaran pajak perusahaan mempengaruhi masyarakat, kewajiban CSR adalah perusahaan harus membayar fair share dari pajak yang dikumpulkan secara sah oleh pemerintah di mana negara mereka beroperasi (Christensen and Murphy dalam Lanis dan Richardson, 2004).

Dengan mengambil sikap pasif terhadap perpajakan, perusahaan dapat memperoleh legitimasi dalam masyarakat dan menjaga good-standing dengan otoritas pajak dengan mematuhi dan mengikuti hukum pajak. Lebih lanjut, jika sebuah perusahaan dianggap sebagai penghindar pajak perusahaan umumnya tidak dianggap membayar "fair share" pajak penghasilan badan kepada pemerintah untuk membantu memastikan pembiayaan barang publik dalam masyarakat.Dengan mengambil pandangan yang berbeda disarankan agresivitas pajak perusahaan harus dianggap sebagai kegiatan yang tidak sah dan tidak bertanggung jawab secara sosial. Dengan demikian, perusahaan yang terlibat dalam kebijakan agresif pajak tidak bertanggung jawab secara sosial dan keputusannya tentang sejauh mana kesiapan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya dipengaruhi oleh sikap terhadap CSR.

Agresivitas pajak adalah strategi perusahaan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat (Christensen dan Murphy, 2004, Sikka, 2010) dalam Lanis dan Richarson (2013). Hlaing (2012) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Cara untuk mengukur perusahaan yang melakukan agresivitas pajak yaitu dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rates* (ETR). Menurut Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan pada penelitian terdahulu. Proksi ETR dinilai menjadi indikator adanya agresivitas pajak apabila memiliki ETR yang mendekati nol. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak. ETR yang rendah menunjukan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak.

# 2.1.5. Variabel Kontrol

### 2.1.5.1. Return on Asset (ROA)

ROA merupakan suatu rasio penting untuk mengukur kemampuan investasi suatu perusahaan (aset) untuk memperoleh laba. Apabila total aset yang digunakan dalam operasi perusahaan mampu memberikan laba maka dapat dikatakan memiliki ROA yang positif dan memiliki peluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Sebaliknya apabila total aset yang digunakan tidak dapat menghasilkan laba maka memiliki ROA negatif dan menghambat pertumbuhan perusahaan. Menurut Lang dan Lundhlom (1996) dalam Lanis and Richardson (2013) sebuah perusahaan dengan kualitas kinerja

yang baik cenderung memiliki laba yang tinggi untuk mengungkapkan "kabar baik" untuk pasar keuangan.

#### **2.1.5.2.** *Leverage* (LEV)

Bambang Riyanto (2001) mendefinisikan *Leverage* sebagai penggunaan aset atau dana dimana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar beban tetap. Rasio ini timbul apabila dalam kegiatan opersionalnya perusahaan menggunakan dana pinjaman atau menggunakan dana yang memiliki beban bunga. Menurut Sanchez, Dominguez, dan Alvarez (2010) mengatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara *leverage* dengan kelengkapan pengungkapan sukarela pada laporan tahunan dikarenakan dengan meningkatnya *leverage*, maka terdapat peningkatan permintaan tambahan informasi yang diminta oleh kreditor guna mencari tahu seberapa besar kemungkinan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya.

#### 2.1.5.3. Capital Intensity (CINT)

Capital Intensity atau Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan (Waluyo dan Kearo, 2002). Intensitas modal dinilai untuk mengetahui prospek di masa mendatang atas investasi yang telah kita tanamkan. Seperti yang dikatakan oleh Commanor dan Wilson (1972) bahwa indikator prospek perusahaan di masa mendatang yang dapat digunakan dalam penelitian adalah intensitas modal. Mosebach dan Ellen (2007) dalam Yoehana (2013) menyatakan bahwa komposisi aset diukur melalui tiga intensitas, yaitu intensitas persediaan (inventory intensity), intensitas modal

(capital intensity) dan intensitas penelitian dan pengembangan (R & D intensity). Selain itu menurut Aerts dan Cornier (2009) dalam Lanis dan Richardson (2013) intensitas modal dapat digambarkan dalam wujud mesin, bangunan, peralatan dll yang menjadi aset tetap suatu perusahaan. Perusahaan dengan aset yang besar akan mengungkapkan informasi CSR lebih besar daripada perusahaan yang memiliki aset lebih rendah.

#### 2.1.5.4. Ukuran Perusahaan (SIZE)

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik yang penting. Perusahaan yang besar tentu akan menjaga *image* dengan mengungkapkan informasi yang akurat dan relevan dan tentu saja akan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat sehingga mendapatkan kesan yang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Cho *et al* (2010) yang mengatakan bahwa perusahaan dengan skala besar akan mengungkapkan CSR lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil dalam laporan tahunan dikarenakan visibilitas yang lebih tinggi. Hal ini menunjukan hal yang positif terkait dengan pengungkapan CSR (Patten 1992, 2002; Hackston dan Milne,1996; Clarkson et al, 2008; Cho *et al*,2010 dalam Lanis dan Richardon, 2013).

# 2.2. Penelitian Terdahulu

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, *Corporate Social Responsibilty* (*CSR*) dan agresivitas pajak perusahaan adalah isu yang telah banyak menarik perhatian literatur akademis. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya belum

banyak yang meneliti bagaimana agresivitas pajak dan CSR dapat saling berkaitan jika dihubungkan dengan teori legitimasi.

Contoh penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara CSR dengan Agresivitas Pajak dilakukan oleh Watson (2012) yang berjudul "Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance, and Tax Aggressiveness". Dalam penelitian yang ini Variabel dependennya adalah agresivitas pajak (ETR) dan variabel independennya adalah CSR. Alat statistik yang digunakan yaitu menggunakan analisis regresi OLS yang memberikan bukti bahwa terdapat hubungan negatif antara CSR dan tarif pajak yang berlaku (ETR). Pada tahun 2012 juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Tao Zeng yang berjudul "Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness". Variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah CSR dan variabel independen adalah agresivitas pajak. Alat uji statistik yang digunakan adalah menggunakan analisis regresi yang memberikan bukti empiris bahwa perusahaan yang melakukan kegitan agresifitas pajak cenderung kurang tertarik untuk bertanggung jawab melakukan CSR. Kemudian oleh Lanis dan Richardson (2012), yang menyusun sejumlah analisis empirik untuk mengetahui hubungan antara pendekatan perusahaan untuk agresivitas pajak dengan tingkat pengungkapan CSR. Proxi yang digunakan adalah ETR (Effective Tax Rates), dan hasil regresi yang ditemukan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan tersebut.

Kemudian juga ada penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Martani pada tahun 2010 yang berjudul "Ownership Characteristics, Corporate Governance,

and Tax Aggressiveness" memberikan bukti secara empiris bahwa pengaruh tata kelola perusahaan yang baik belum berdampak signifikan di perusahaanperusahaan di Indonesia dan struktur kepemilikan keluarga berhubungan positif dengan tingkat agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur Indonesia yang listing pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005-2008 dengan menggunakan analisis regresi anova. Variabel dependen yang ada dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak yang diukur menggunakan effective tax rate (ETRit), cash effective tax rate (CETRit), book-tax difference (BTD\_MPit), residual book-tax difference (BTD\_DDit), dan average of corporate tax planning level (Tax Plan it). Sementara variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan, dimana termasuk kepemilikan keluarga apabila saham yang dimiliki keluarga adalah 50% dan Good Corporate Governance yang diukur menggunakan indeks Corporate Governance. Variabel Kontrol yang digunakan adalah ROA; leverage; kompensasi kerugian fiskal; perubahan jumlah kompensasi kerugian fiskal; property, plant, and equipment; size, market to book ratio; dan nilai BTD.

Beberapa penelitian terdahulu lainnya yang terkait dengan variabel agresivitas pajak dan CSR adalah seperti penelitian yang dilakukan oleh Craig Deegan, Michaela Rankin and John Tobin (2002) yang berjudul "An examnation of the corporate social and environmental disclosures of BHP from 1983-1997: A test of legitimacy theory". Variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah pengungkapan CSR dan variabel Independennya adalah Liputan media (favorable dan unfavorable) pada perusahaan agresivitas pajak yaitu perusahaan BHP.

Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi yang memberikan bukti empiris bahwa keberadaan liputan media (unfavorable) berhubungan positif dengan CSR. Selanjutnya penelitian Reuven S. Avi-Yonah (2006) yang berjudul "Corporate Social Responsibility and Strategic Tax Behavior". Dalam penelitian tersebut variabel dependen yang digunakan adalah Corporate Social Responsibility dan Variabel independennya adalah Strategic Tax Behavior. Penelitian tersebut memberikan bukti bahwa perilaku strategi pajak berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti	Variabel	Hasil
				Penelitian
1.	An examnation of the corporate social and environmental disclosures of BHP from1983-1997. A test of legitimacy theory	Craig Deegan, Micha ela Rankin and John Tobin (2002)	Variabel dependen: Pengungkapan CSR Variabel Independen Liputan media (favorable dan unfavorable) pada perusahaan agresivitas pajak. Menggunakan analisis regresi	Memberikan bukti empiris bahwa keberadaan liputan media (unfavorable) Berhubungan positif dengan CSR
2.	Corporate Social Responsibility and Strategic Tax Behavior	Reuven S. Avi-Yonah (2006)	Variabel dependen: Corporate Social Responsibility Variabel independen: Strategic Tax Behavior	Perilaku strategi pajak berpengaruh terhadap corporate social responsibility.

3.	Ownership Characteristics, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness	Sari dan Martani(2010)	Variabel dependen: agresivitas pajak (ETRit, CETRitBTD_MPit, BTD_DDit, dan Tax Plan it). Variabel independen: struktur kepemilikan saham dan indeks corporate governance. Menggunakan analisis regresi anova	Memberikan bukti secara empiris bahwa pengaruh tata kelola perusahaan yang baik belum berdampak signifikan di perusahaan Indonesia dan struktur kepemilikan keluarga berhubungan positif dengan tingkat agresivitas pajak
4.	Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance, and Tax Aggressiveness	Watson (2012)	Variabel dependen: agresivitas pajak (ETR) Variabel independen : CSR. Menggunakan analisis regresi OLS	Memberikan bukti empiris bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
5.	Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness	Tao Zeng (2012)	Variabel dependen: CSR Variabel independen: agresivitas pajak Menggunakan analisis regresi	Memberikan bukti empiris bahwa perusahaan yang melakukan Kegiatan agresivitas pajak cenderung kurang tertarik untuk bertanggung jawab

				melakukan CSR
6.	Corporate Social	Lanis dan	Variabel dependen:	Memberikan
	Responsibility and	Richardson	agresivitas pajak	bukti empiris
	Tax	(2012)	(ETR)	bahwa semakin
	Aggressiveness: An		Variabel	tinggi tingkat
	Empirical Analysis		independen: CSR	pengungkapan
			Menggunakan	CSR suatu
			analisis regresi	perusahaan,
			Tobit	semakin
				rendah
				tingkat
				agresivitas
				pajak yang
				dilakukan
7.	Corporate Social	Lanis dan	Variabel dependen:	Hasil empiris
	Responsibility and	Richardson	CSR	secara
	Tax		Variabel	konsisten
	Aggressiveness:a	(2013)	independen:	menunjukan
	test of		Agresivitas pajak	hubungan
	legitimacy theory		Menggunakan	positif dan
			analisis regresi	signifikan
			OLS	agresivitas
				pajak
				perusahaan dan
				pengungkapan
				CSR yang
				membenarkan
				teori legitimasi
				dalam konteks
				agresivitas
				pajak.

Penelitian ini, mereplika penelitian yang pernah dilakukan oleh Lanis dan Richardson tahun 2013 yang berjudul "Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: a test of legitimacy theory" namun, disesuaikan dengan konteks di Indonesia. Penelitian yang saya lakukan ini akan mengambil sampel perusahaan di Indonesia sepanjang tahun 2013 yang terlibat kasus agresivitas pajak, dan menggunakan variabel dependen CSR yang diproksikan dalam CSR disclosure

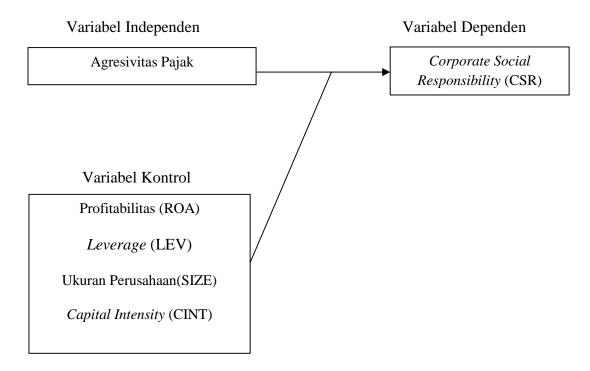
yang terbagi dalam 73 item. Sementara variabel independen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak perusahaan yang diproksikan dalam proksi ETR1 (*Effective Tax Rates*) dan ETR2, serta BTD (*Book Tax Difference*).

# 2.3. Kerangka Pemikiran

Perusahaan yang agresif pajak akan cenderung mengungkapkan informasi CSR lebih besar dikarenakan beban pajak perusahaan yang seharusnya dikeluarkan dialihkan untuk beban CSR. Pengungkapan CSR diperlukan sebagai wujud timbal balik kepada masyarakat yang mana, perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak lepas dari lingkungan dan dukungan dari masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan legitimasi positif dari masyarakat. Deegan (2006) dan Dillard dkk. (2004) dalam Ahmad Nurkin (2009) menyatakan bahwa kerangka teoritis yang menjadi kajian selama beberapa tahun untuk menjelaskan mengapa organisasi melaksanakan pelaporan sukarela terkait dengan lingkungan adalah teori legitimasi.

Penelitian ini berfokus pada seberapa tinggi tingkat perusahaan melakukan agresivitas pajak terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel dependen, agresivitas pajak sebagai variabel independen. Dalam penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol antara lain profitabilitas (ROA), *leverage* (LEV), ukuran perusahaan (*SIZE*), *capital intensity* (CINT). Oleh karena itu dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



# 2.4. Hipotesis

Pajak merupakan iuran yang harus dibayar oleh semua wajib pajak. Perusahaan sebagai wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayarnya. Dengan membayar pajak maka perusahaan menunaikan kewajiban serta membantu negara untuk melakukan pembangunan nasional. Perusahaan mungkin berpendapat jika mereka menggunakan perencanaan pajak dengan melakukan penghindaran pajak atau perencanaan pajak secara legal mereka tidak akan merugikan pihak manapun karena kegiatan yang mereka lakukan tidak melawan hukum. Namun, bagaimanapun dengan melakukan penghindaran pajak artinya perusahaan menurunkan pendapatan negara yang seharusnya didapat. Secara hukum perusahaan tidak melakukan pelanggaran tetapi ada nilai sosial yang

diabaikan perusahaan karena pajak bertujuan untuk pembangunan nasional dan mensejahterahkan rakyat.

Kinerja perusahaan tidak lepas dari lingkungan dan masyarakat. Salah satu bentuk interaksi perusahaan adalah melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang sesuai dengan teori legitimasi. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan menarik perhatian masyarakat agar perusahaan tersebut mendapatkan kesan yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan dituntut untuk melakukan CSR agar dapat memperbaiki legitimasi dari masyarakat dan mendapatkan keuntungan. Perusahaan dikatakan berhasil apabila dapat memenuhi harapan masyarakat melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebaliknya, perusahaan akan mengarah pada kegagalan apabila tidak dapat memenuhi harapan masyarakat dan tentunya menimbulkan penyebaran informasi negatif tentang perusahaan tersebut.

Tindakan meminimalkan beban pajak atau agresivitas pajak di kalangan perusahaan-perusahaan besar sering terjadi, terutama di Indonesia. Perusahaan merasa terbebani dengan banyaknya beban yang ditanggung, misalnya kasus yang saat ini terjadi adalah perusahaan berusaha untuk menekan beban CSR perusahaan dengan meminimalkan beban pajaknya. Tindakan tersebut pada dasarnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan memiliki dampak negatif terhadap masyarakat karena mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam menyediakan barang publik (Lanis dan Richardson, 2013). Kewajiban dalam membayar pajak seharusnya dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan. Namun, banyak perusahaan justru melanggar peraturan perundang-undangan pajak dengan

mengurangi pajak yang seharusnya dibebankan kepada perusahaan tersebut. Perilaku ini membuat manfaat pajak tidak maksimal dalam menyejahterakan masyarakat. Padahal pajak dipandang sebagai dividen yang dibayar oleh perusahaan kepada masyarakat sebagai imbalan telah menggunakan sumber daya yang tersedia (Harari, et.al, 2012).

Menurut Avi Yonah (2008) dan Symons (2008) menyatakan bahwa tindakan sengaja dengan tujuan meminimalkan pajak perusahaan dianggap tidak sah. Perilaku ini dianggap sebagai tindakan menyimpang yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau tindakan yang ilegal demi kepentingan perusahaan. Tindakan agresivitas tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah serta bertentangan dengan teori legistimasi.

Terdapat beberapa penelitian yang telah menguji hubungan antara pengungkapan sosial dengan teori legitimasi, namun hasil analisis yang dihasilkan tidak memperoleh hasil yang signifikan. Guthrie dan Parker (1989) dalam Lanis dan Richardson (2013) melakukan penelitian berkaitan dengan agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan di Australia. Menurut teori legitimasi, perusahaan yang melakukan agresivitas pajak memerlukan pengungkapan informasi tambahan mengenai CSR untuk memenuhi harapan masyarakat. Namun, hasil penelitian tersebut gagal karena dianggap tidak konsisten. Penelitian serupa dilakukan oleh Deegan, et.al (2002) dalam Lanis dan Richardson (2013) dengan menganalisis laporan tahunan perusahaan agresivitas pajak yang sama di Australia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada hubungan antara masyarakat terhadap isu-isu

sosial, lingkungan tertentu dan pengungkapan CSR dalam laporan tahunan yang mana mengaitkan CSR dengan liputan media.

Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Guthrie dan Parker (1989). Deegan, et.al (2002) menyimpulkan bahwa ada hubungan teori legitimasi yang mendasari tindakan agresivitas pajak. Serta terdapat penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson pada tahun 2013 yang menguji pengaruh antara agresivitas pajak terhadap CSR untuk menguji teori legitimasi dan menunjukan hasil yang positif.

Belum ada arah konsistensi yang jelas mengenai hubungan agresivitas pajak terhadap CSR untuk menguji teori legitimasi. Namun jelas bahwa perusahaan yang melakukan agresivitas pajak akan meminimalkan pembayaran pajak perusahaan demi pencapaian keuntungannya. Perusahaan dapat memperoleh keuntungan baik dari segi *finansial* maupun *non finansial*. Apabila dari segi *finansial* perusahaan dapat memperoleh laba yang tinggi dengan membayar pajak yang rendah. *Stakeholder* dapat memperoleh dividen yang tinggi sejalan dengan meningkatnya laba perusahaan. Namun di sisi lain, pemerintah akan mengalami kerugian akibat dari tindakan manipulasi (kecurangan) perusahaan tersebut. Sedangkan dari segi *non finansial*, perusahaan yang terlibat dalam agresivitas pajak akan mendapat tanggapan negatif publik dari masyarakat. Tanggapan tersebut merupakan bentuk kegagalan perusahaan dalam memenuhi harapan masyarakat karena melakukan kecurangan terhadap pembayaran pajak (Christesen dan Murphy, 2004; Landolf, 2006; Williams, 2007; Landolf dan Symons, 2008; ATO, 2009).

Berdasarkan uraian di atas dan belum adanya arah konsistensi yang jelas mengenai hubungan agresivitas pajak terhadap CSR untuk menguji teori legitimasi, maka hipotesis yang diajukan adalah:

 $H_1$ : Agresivitas Pajak berpengaruh positif terhadap CSR (Corporate Social Responsibility)

#### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### 3.1. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel dependen, variabel independen dan variabel kontrol. Agresivitas pajak sebagai variabel independen. Corporate Social Responsibility sebagai variabel dependen. Profitabilitas, *Leverage*, ukuran perusahaan (SIZE), *Capital Intensity* sebagai variabel kontrol. Berikut adalah definisi operasional masing – masing variabel.

# 3.1.1 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang nilainya mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal, ilegal, maupun kedua-duanya. Penelitian ini mengukur agresivitas pajak dalam beberapa proksi pengukuran. Adapun yang menjadi proksi utama dalam penelitian ini adalah *Effective Tax rates* 1 (ETR1) yang dihitung dari:

$$ETR1 = \frac{\text{beban pajak penghasilan}}{\text{pendapatan sebelum pajak}}$$

ETR1 menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak yang diperoleh perusahaan. ETR1 diukur dengan menggunakan proksi model Lanis dan

Richardson (2012). Sementara ukuran alternatif yang digunakan untuk memperkuat hasil penelitian ini adalah:

$$ETR2 = \frac{\text{beban pajak penghasilan}}{\text{arus kas operasi}}$$

$$BTD = \frac{[\text{Laba akuntansi } - \text{laba fiskal}]}{\text{total aset bersih}}$$

ETR2 diukur dengan menggunakan proksi model Lanis dan Richardson (2012) yang menggambarkan seberapa besar total beban pajak yang dibayarkan perusahaan dibandingkan dengan jumlah total arus kas dari aktivitas operasi perusahaan. Sementara (*Book tax Differences*) BTD menurut Lanis dan Richardson (2011) adalah total perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal.

# 3.1.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dapatdipengaruhi oleh variabel independen secara positif atau negatif (Sekaran, 2007). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Corporate Social Responsibility (CSR) yang diproksikan ke dalam pengungkapan CSR. Penelitian ini menggunakan *check list* yang mengacu pada indikator pengungkapan menggunakan indeks GRI 3.1 karena sesuai dengan keadaan perusahaan di Indonesia dan juga dapat diperbandingkan dengan keadaan dunia Internasional, dimana pegungkapan CSR-nya lebih bersifat khusus dan sudah rinci. Indikator ini terdiri atas enam kategori, yaitu ekonomi,

lingkungan, keselamatan tenaga kerja, hak asasi manusia, keterlibatan masyarakat, dan tanggung jawab produk.Namun disini, indeks ekonomi tidak disajikan karena seluruh perusahaan sudah dipastikan melakukan tanggung jawab sosialnya dalam bidang ekonomi secara lengkap. Jumlah item yang diharapkan diungkapkan oleh seluruh perusahaanyang *listing* di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013 adalah sebanyak 75 item yang terdiri atas kategori lingkungan (30 item), kategori keselamatan tenaga kerja (15 item), kategori hak asasi manusia (11 item), kategori keterlibatan masyarakat (10 item), dan kategori tanggung jawab produk (9 item).

Pengukuran ini dilakukan dengan mencocokkan item pada *check list* dengan item yang diungkapkan perusahaan. Apabila item y diungkapkan maka diberikan nilai 1, jika item y tidak diungkapkan maka diberikan nilai 0 pada *check list*. Setelah mengidentifikasi item yang diungkapkan oleh perusahaan di dalam laporan tahunan, serta mencocokkannya pada *check list*, hasil pengungkapan item yang diperoleh dari setiap perusahaan dihitung indeksnya dengan proksi CSRI. Adapun rumus untuk menghitung CSRI sebagai berikut:

$$CSRIj = \frac{\sum Xyi}{ni}$$

CSRIi : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan i.

Xyi : Nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak diungkapkan.

ni : jumlah item untuk perusahan i, ni 75.

#### 3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel Kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel kontrol antara lain:

#### 3.1.3.1. Return on Asset

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Penelitian ini menggunakan ROA sebagai proksi untuk mengukur profitabilitas. ROA diukur dengan menggunakan proksi model Lanis dan Richardson (2012) yaitu:

$$ROA = \frac{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

#### **3.1.3.2.** Leverage

Leverage menggambarkan proporsi hutang jangka panjang terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Leverage menurut Lanis dan Richardson (2012) dihitung dari:

$$LEV = \frac{\text{Hutang Jangka Panjang}}{\text{Total Aset}}$$

#### 3.1.3.3. Capital Intensity

Capital Intensity menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Capital intensity menurut Lanis dan Richardson (2012) dihitung dari:

$$CINT = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

#### 3.1.3.4. Ukuran Perusahaan

Menurut Ferry dan Jones (dalam Sujianto, 2001), ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Jadi, ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki oleh perusahaan. (SIZE) digunakan untuk mengontrol efek ukuran perusahaan. Berdasarkan penelitian sebelumnya Richadson dan Lanis (2007) berharap menemukan bahwa sebuah perusahaan yang lebih besar mungkin menjadi lebih agresif pajak dari pada perusahaan yang ukurannya lebih kecil karena mereka menguasai kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar. Ukuran perusahaan Menurut Lanis dan Richardson (2012) dihitung dari:

$$Size = Ln (Total Aset)$$

# 3.2. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2013. Alasan memilih seluruh

perusahaan sebagai sampel karena perusahaan di Indonesia jumlahnya sangat banyak, dan penulis tertarik untuk menganalisis apakah seluruh perusahaan-perusahaan tersebut terindikasi melakukan tindakan agresivitas pajak. Sebagian besar perusahaan di Indonesia adalah perusahaan sektor manufaktur, dan memang dalam sektor manufaktur memiliki jumlah terbesar dalam kasus agresivitas pajak dibandingkan dengan sektor yang lainnya, khususnya pada bidang pertambangan dan properti. Namun dalam penelitian kali ini, penulis ingin menganalisa perusahaan mana saja yang terindikasi melakukan agresivitas pajak tidak hanya dari sektor manufaktur, tetapi juga dari sektor lainnya.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sa*mpling. Metode *purposive samp*ling adalah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjek peneliti

# 3.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan merupakan data kuantitaif. Sedangkan sumber data yang digunakan merupakan jenis data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan seluruh perusahaan yang listing di BEI selama tahun 2013, yang didokumentasikan dalam www.idx.co.id.

Data yang diambil berupa data *cross section*, artinya bahwa pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber informasi perusahaan dari Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013.

# 3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka. Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan telaah pusataka, eksporasi dan mengkaji berbagai sumber seperti buku, jurnal dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data-data sekunder yaitu berasal dari sumber yang ada. Data sekunder pada penelitian ini dapat diperoleh dengan mengakses website www.idx.go.id.

#### 3.5. Metode Analisis Data

#### 3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum.Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut (Ghozali, 2006).

# 3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan ada 4 yaitu : uji multikolienaritas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas. Namun dalam penelitian ini tidak dilakukan uji multikolinieritas karena hanya ada satu variabel independen dalam penelitian ini, yaitu agresivitas pajak. Dan juga tidak dilakukan uji autokorelasi, dikarenakan sampel yang digunakan pada penelitian kali ini hanya dalam periode setahun, yaitu tahun 2013.

39

3.5.2.1. Uji Normalitas

Asumsi normalitas digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi

normal atau tidak. Data yang baik adalah yang berdistribusi normal. Uji

normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel

dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau

tidak (Ghozali, 2006).

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan

membuat hipotesis:

H0: data residual berdistribusi normal

HA: data residual tidak berdistribusi normal

Level of Significant yang digunakan adalah 0,05. Data berdistribusi normal jika

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) hasil perhitungan dalam komputer lebih dari 0,05.

3.5.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan

yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas

(homokedastisitas) dimana *variance* residual satu pengamatan ke pengamatan lain

tetap. Ada beberapa cara untuk menguji heteroskedastisitas dalam variance error

terms untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan digunakan metode chart

(diagram scatterplot) dengan dasar analisis yaitu:

40

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit),

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah

angka 0 dan pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

(Ghozali, 2006).

3.5.3 **Uji Hipotesis** 

Setelah dilakukan pengujian atas asumsi klasik.dilakukan pengujian

hipotesis. Pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah dengan menggunakan

analisis regresi berganda.Persamaan statistik pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen. Persamaan regresi bergandauntuk pengujian hipotesis

dalam penelitian ini adalah:

TAGit = 0 + 1 CSRIit + 2 ROAit + 3 LEVit + 4 CINTit + 5 SIZEit + e

Keterangan:

TAGit

: Agresivitas pajak perusahaan i tahun ke-t yang diukur

menggunakan proksi: ETR1, ETR2, dan BTD

0

: Konstanta

1, 2, 3, 4

: Koefisien regresi

**CSRIit** 

: Pengungkapan item CSR perusahaan *i* tahun ke-*t* 

**ROAit** 

: Tingkat pengembalian aset perusahaan *i* tahun ke-*t* 

LEVit : Proporsi hutang jangka panjang terhadap aset perusahaan

*i*tahun ke-*t* 

CINTit : Proporsi property, plant, and equipment terhadap total aset

tetap perusahaan *i* tahun ke-*t* 

SIZEit : Tingkat ukuran perusahaan *i* tahun ke *t* 

e : Error (kesalahan pengganggu)

Dengan persamaan statistik di atas, hipotesis alternatif akan diterima dengan tingkat signifikansi 5%. Apabila tingkat sig dari hasil analisis lebih kecildari 0,05 maka hipotesis penelitian diterima.

#### 3.5.3.1. Koefisien Determinasi (R2)

Menurut Ghozali (2011) menyatakan bahwa koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam rangka menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali (2011) menyatakan jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R<sup>2</sup> negatif, maka nilai adjusted R<sup>2</sup> dianggap nol.

# 3.5.3.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2011) menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji ini yaitu menggunakan quick look yang berarti

Ho dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5% apabila nilai F lebih besar daripada 4 dan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel yang berarti apabila nilai F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan menerima HA.

# 3.5.3.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Menurut Ghozali (2011) Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Cara melakukan uji t yaitu dengan *quick look* yang artinya apabila jumlah df adalah 20 atau lebih dan derajat kepercayaan sebesar 5% maka Ho yang menyatakan bi=0 dapat diolak bila nilai t lebih besar dari 2 dan dengan cara membandingan nilai t hasil dengan titik krisis menurut tabel. Apabila t hasil lebih tinggi daripada t tabel, maka HA yang meyatakan variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.